

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PASAL 2 NO.20/DSN-MUI/IV/2001

TENTANG MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

(Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

ZAINAL ABIDIN

NPM : 1621030160

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PASAL 2 NO.20/DSN-MUI/IV/2001

TENTANG MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH

(Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

ZAINAL ABIDIN

NPM : 1621030160

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing Akademik I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H

Pembimbing Akademik II : Muslim, S.H.I, M.H.I

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2020 M

ABSTRAK

Investasi mulai diminati masyarakat, investasi artinya menanam modal, tujuannya mendapatkan keuntungan dikemudian hari, media investasi saat ini dalam dunia pasar modal adalah reksa dana Syariah. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana cara kerja berinvestasi di pasar modal syariah pada produk reksa dana Syariah dan Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa dana Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, khususnya di PT Indo Premier Sekuritas. Adapun Tujuan Penelitian ini, untuk mengetahui Mekanisme Investasi pada produk Reksa Dana Syariah di Pasar Modal Syariah pada Lembaga Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung serta untuk mengetahui Implementasinya sesuai atau tidak terhadap Fatwa DSN-MUI Pasal 2 tersebut, agar diketahui penerapan daripada fatwa tersebut di dunia pasar modal. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini deskriptif analisis, penelitian yang menggambarkan, permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu, dilakukan guna mendeskripsikan Implementasi Fatwa MUI sebagai pedoman kegiatan reksa dana Syariah. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi atau pengamatan secara langsung, wawancara dengan Pihak *Trainer* di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan *Marketing Officer* dari PT. Indo Premier Sekuritas terkait Implementasi Fatwa Pasal 2 tersebut, dan dokumentasi secara langsung guna memperdalam data. Sedangkan pengolahan data menggunakan Pemeriksaan, Penomoran, serta sistematis dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama: Cara kerja dalam berinvestasi untuk reksa dana Syariah khususnya di PT. Indo Premier Sekuritas, mengikuti Sekolah Pasar modal, mengisi data diri pada kontrak, dijelaskan tentang sistem Syariah oleh Sekuritas, Melampirkan data diri, yaitu KTP, NPWP, dan Buku Tabungan Bank. Setelah semua syarat telah dipenuhi, maka proses reksa dana Syariah dapat dilakukan, Pemodal mewakilkan dirinya kepada Manajer Investasi yang dinamakan sistem *Wakalah*, lalu bagi hasilnya dengan sistem *Mudharabah qiradh*. Kedua: Implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 No.20/DSN-MUI/IV/2001 di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, khususnya di PT Indo Premier Sekuritas bahwa fatwa tersebut telah diimplementasikan dengan baik, di Bursa maupun di Sekuritas yang dimilikinya, dengan bukti jika Sekuritas penyedia reksa dana Syariah masih dibuka, artinya Sekuritas tersebut menjalankan fatwa MUI, Pihak Bursa dan Sekuritas menerangkan bahwa kegiatan reksa dana Syariah ini selalu diawasi oleh Pihak OJK yang bertugas mengawasi segala kegiatan lembaga keuangan yang legal, dan juga DPS tugasnya mengawasi jalannya fatwa dilapangan, apabila tidak dijalankan izin usaha dapat dicabut, Karena tidak mematuhi fatwa DSN MUI. Hanya saja yang menjadi catatan perlunya edukasi kepada investor reksa dana Syariah, karena masih banyak yang belum mengerti tentang sistem Syariah khususnya yang dimaksud dengan *Mudharabah qiradh*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin

NPM : 1621030160

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PASAL 2 NO,20/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Jika dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya kepada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Juli 2020
Penulis,

Zainal Abidin
1621030160



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama : Zainal Abidin

NPM : 1621030160

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Fakultas : Syariah Dan Hukum

**Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PASAL 2 NO 2001/DSN-MUI
IV/2001 TENTANG MEKANISME KEGIATAN REKSA
DANA SYARIAH (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor
Perwakilan Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

NIP. 195704031987031003

Pembimbing II

Muslim, S.H.I, M.H.I

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Surasmi Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI PASAL 2 NO.20/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH** (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung) disusun oleh **Zainal Abidin, NPM 1621030160, Jurusan Mu'amalah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada Hari/ Tanggal: **Senin, 27 Juli 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

KETUA : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

SEKRETARIS : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

PENGUJI I : Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S.Ag. M.H.

PENGUJI II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini Kupersembahkan, serta Kudedikasikan sebagai bentuk ungkapan syukur, tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada :

- Ayahanda Usman Abu Bakar dan Ibunda Siti Fatimah, atas segala jasa, pengorbananan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat kalian bangga.
- Ketiga adikku Ridwan Rafsanzeni, Iqbal Al-Fattah, dan Marwah Azizah, terima kasih atas segala dukungan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kalian untuk menjalani pendidikan sebaik-baiknya.
- Kekasihku Putri Wulandari yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan kepadaku.
- Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama Zainal Abidin, dilahirkan di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, lahir pada tanggal 28 Januari 1998, Anak Pertama dari empat bersaudara, dilahirkan dari hasil buah cinta Bapak Usman Abu Bakar dan Ibu Siti Fatimah.

Menempuh pendidikan berawal pada :

- Taman kanak-kanak (TK) Nurul Fuad Kecamatan Panjang Bandar Lampung, mulai masuk pada tahun ajaran 2002 sampai dengan 2003.
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Karang Maritim, di Kecamatan Panjang, masuk pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2010.
- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 30 Serengsem Bandar Lampung, mulai masuk pada tahun 2010 sampai dengan 2013.
- Madrasah Aliyyah (MA) Al-Asy'ariyah Bandar Lampung, mulai masuk pada tahun 2013 sampai dengan 2016.
- Pada tahun 2016 melanjutkan ke bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Pada tahun 2017 telah bertransformasi menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung, mengambil jurusan Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dari dunia sampai akhirat nanti.

Adapun judul skripsi ini “Implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang peneliti miliki. Oleh karena itu mohon kiranya diberikan kritik dan saran yang baik dan sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muslim, S.H.I, M.H.I selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah, dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2016, Khususnya sahabat-sahabat di Muamalah K, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat, Agung Rianto, Rio, Delly, Habib, Eko Firmanto, Puput.
8. Kelompok KKN 118 Angkatan Tahun 2016, Terima Kasih atas dukungan kalian semua.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah berjasa membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang Ikhlas dan Amal Baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Akhir kata, saya memohon taufik serta hidayah kepada Allah SWT. Juga Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi semua pada umumnya, Āmīn.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, April 2020

Penulis,

Zainal Abidin
NPM.1621030160

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian/ Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi/ Manfaat Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian teori.....	16
1. Reksa dana Syariah	16
a. Pengertian Reksa dana Syariah.....	19
b. Dasar Hukum Reksa dana Syariah	20
c. Sejarah Reksa dana Syariah	23
d. Prinsip Transaksi Reksa Dana Syariah	25
e. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional	25
2. Pedoman Investasi Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.20/IV Tahun 2001	26
a. Mekanisme Kegiatan Reksa dana Syariah Berdasarkan Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001	26
b. Keuntungan dan Resiko Kerugian Investasi pada Reksa Dana Syariah.....	29
1) Keuntungan Investasi pada Reksa Dana Syariah.....	29

2) Resiko Investasi pada Reksa Dana Syariah	33
3) Ketentuan Penutup pada Fatwa.....	35
4) Kedudukan Fatwa Majelis Ulama dalam Islam	35
B. Tinjauan Pustaka	47

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Sistem Kerja Perusahaan	62
C. Sekuritas Reksa dana Syariah Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	63
D. Mekanisme Pelaksanaan Reksa dana Syariah di Sekuritas Reksa dana Syariah	64
E. Mekanisme Pelaksanaan Reksa dana Syariah di Bursa Efek Kantor Perwakilan Lampung	66

BAB IV ANALISIS DATA

A. Mekanisme Pelaksanaan Investasi Reksa dana Syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung Berdasarkan Fatwa MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001	68
B. Implementasi Fatwa MUI No. 20/IV Tahun 2001 pada Lembaga Sekuritas Reksadana Syariah di Bursa Efek Kantor Perwakilan Lampung.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Pelaksanaan Wawancara dan Sekolah Pasar Modal
Lampiran 2	Pertanyaan yang diajukan kepada pihak Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung
Lampiran 3	Pertanyaan yang diajukan kepada Pihak PT. Indo Premier Sekuritas
Lampiran 4	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana Syariah berdasarkan Fatwa MUI NO 20/DSN-MUI/IV/2001
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian
Lampiran 6	Hasil Cek Turnitin

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional	26
2. Nama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Daerah	52
3. Bagan Struktur Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Foto Wawancara dengan Arum Isti Khairani Selaku <i>Marketing Officer</i> di PT. Indo Premier Sekuritas	xxii
2. Foto Wawancara dengan Fahmi Al Kahfi Selaku Trainer Officer di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung	xxii
3. Pelaksanaan Sekolah Pasar Modal di Bursa Efek Kantor Perwakilan Lampung.....	xxiii

BABI PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Supaya menjadi arah sekaligus dapat memberikan gambaran yang jelas dari semua isi yang terkandung di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan skripsi ini, tentunya tidak akan terlepas dari judul. **“Implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah (Studi kasus di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”**.

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah :

Implementasi, yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).¹

Fatwa DSN MUI, *Fatwa* yaitu suatu perkataan dari bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan

¹ Kamus Puser Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.548.

hukum positif mengikat, Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi Syariah.²

Pasal, yaitu bagian dari bab, artikel (dalam Undang-Undang), maksudnya adalah pasal itu merupakan bagian yang ada dalam bab yang ada di dalam sebuah regulasi atau Undang-Undang, jadi Pasal itu adalah isi daripada setiap Bab pada Undang-Undang tersebut.³

Mekanisme, yaitu hal kerjanya suatu organisasi, perkumpulan dan sebagainya.⁴

Kegiatan, yaitu aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan, berkegiatan maksudnya adalah mempunyai kegiatan atau usaha.⁵

Reksa dana Syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi. Begitu pula, pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁶

Investasi, yaitu penanaman modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertentu. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan.⁷

² Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 7.

³ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.299.

⁴ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h.935.

⁵ *Ibid*, h.477.

⁶ Muhammad Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 435.

⁷ Zona Referensi” (On-line), tersedia di : <http://www.zonareferensi.com> (4 desember 2019).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa judul skripsi ini adalah sebuah penelitian mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah dengan Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, yang alamatnya berada di Jl. Jendral Sudirman No. 5D, Bandar Lampung, dengan kode POS 35118.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi peneliti untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Bahwa Investasi untuk reksadana syariah telah diperbolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan dikeluarkan Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 sebagai pedoman dalam pelaksanaan investasi di pasar modal syariah, jika memenuhi segala persyaratan yang tercantum di dalam fatwa MUI tersebut. Dengan fasilitas Fatwa yang diberikan sebagai pedoman ingin mengetahui seperti apa implementasi daripada fatwa tersebut di lapangan mengenai investasi untuk reksadana syariah di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh peneliti yaitu jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Menambah pengetahuan yang membahas pokok masalah tentang implementasi fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 berkaitan dengan pedoman dalam pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah, khususnya pada mekanisme atau cara kerja dari reksa dana syari'ah tersebut, agar lebih menambah pemahaman peneliti mengenai reksa dana syariah selaku Mahasiswa jurusan Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan pada umumnya supaya menambah *khazanah* pengetahuan bagi para mahasiswa yang membaca nantinya.

C. Latar Belakang Masalah

Investasi adalah penanaman modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertentu. Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang dilakukan sebagai modal yang ditanamkan pada perusahaan atau proyek tertentu.⁸

Reksa dana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi, begitu pula, pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁹

Reksa dana menurut Undang-Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana

⁸ Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 7.

⁹ Muhammad Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 435.

dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Fatwa DSN-MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, didefinisikan sebagai wadah yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.¹⁰

Pada pelaksanaan investasi ini bertujuan mendapatkan keuntungan atau *dividen* dari perusahaan atau *emiten* pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah ini diatur dalam fatwa MUI yaitu NO.20/DSN-MUI/IV/2001.

Reksa Dana Syariah adalah suatu produk yang beroperasi di Pasar Modal Syariah, Pasar Modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual, menurut Bodie, Kane & Marcus (2003).¹¹

Pasar Modal telah menjadi saraf finansial dunia ekonomi modern dalam berinvestasi saat ini. Investasi pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Investasi yang islami menurut Dewan Syariah Nasional (2003) dan *Security Commission* (2005).¹²

¹⁰ Hariandy Hasby, "Kinerja Reksadana Syariah Tahun 2009". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14, No.1 (Januari 2010), h.61.

¹¹ *Ibid*, h.62.

¹² *Ibid*, h.63.

Yaitu dapat berupa instrumen/ efek yang didasarkan pada syariat Islam dan diperjual belikan di bursa atau di institusi keuangan, seperti asuransi Syariah, tabungan/ deposito Syariah, saham, *sukuk* maupun reksadana Syariah.¹³

Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebanyak 130 fatwa, fatwa yang terakhir dikeluarkan pada tahun 2019 berkaitan dengan ekonomi syariah, yaitu Fatwa NO.130/DSN-MUI/X/2019.¹⁴

Fatwa DSN MUI telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari *the living law*-nya adalah Hukum Islam.¹⁵

Secara Teoritis, Ulama mempunyai peran yang sangat strategis di dalam kehidupan masyarakat Islam, dan secara faktual ini telah terbukti di dalam sejarah yang panjang. Ulama adalah figur-figur yang diidealisasikan umat, bahkan merupakan patron sosial umat. Ulama ditempatkan sebagai rujukan atau *literati* tidak hanya pada bidang agama tetapi juga sering pada bidang-bidang lainnya. Proses mobilitas vertikal dan perolehan legitimasi sebagai ulama

¹³ *Ibid*, h.64.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/> (30 Juli 2020)

¹⁵ Andi Fariana, “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Hikam*, Vol.12 No.1(Juni 2017), h.87.

melalui jalan yang panjang dalam bentuk seleksi sosial tentang kapasitas keilmuan, rekam jejak dan integritas.¹⁶

Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung sudah terdapat tempat sebagai penjalan program jual beli saham atau investasi yang diperuntukan untuk reksadana syariah, namun belum dapat diketahui apakah sudah secara keseluruhan diterapkan Fatwa MUI dalam Implementasinya.

Pelaksanaan investasi syariah khususnya pada reksa dana syariah haruslah berjalan sesuai dengan fatwa yang diberikan oleh MUI, dalam hal ini DSN MUI memberikan Pedoman tentang pelaksanaan investasi pada reksa dana syariah agar tidak keluar dari nilai-nilai keislaman dalam kegiatan perekonomian syariah, seperti harapan umat islam yang menggunakan nya sebagai sarana dalam investasi agar kegiatan nya sesuai tuntunan agama islam.

Pedoman Pelaksanaan Investasi yang diberikan Majelis Ulama Indonesia diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan, khususnya dalam hal ini akan dilakukan penelitian di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian / Batasan Masalah

Investasi pada Reksa dana syariah sudah dipraktikan dilapangan yaitu dalam hal ini pada lembaga Bursa Efek Indonesia Khususnya Kantor Perwakilan Lampung maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui seperti apa implementasi dari fatwa NO.20/DSN-MUI/IV/2001 dalam

¹⁶ M Yasir Nasution, "Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *Jurnal Human Falah*, Vol.1 No.1 (Januari-Juni 2014), h.27.

mekanisme pelaksanaan nya terkait investasi pada produk pasar modal syariah yaitu reksadana syariah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja dalam berinvestasi di pasar modal syariah untuk produk reksadana syariah ?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 No 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa dana Syariah, di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, khususnya di PT. Indo Premier Sekuritas ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah mekanisme investasi pada produk reksadana syariah di pasar modal syariah pada Lembaga Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui implementasinya terhadap fatwa NO 20/DSN-MUI/IV/2001.

G. Signifikasi / Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap mahasiswa dan masyarakat mengenai implementasi pedoman fatwa MUI terhadap pelaksanaan investasi syariah pada produk reksadana syariah, dan diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang keislaman khususnya Hukum Syariah yang berkaitan dengan Pasar Modal

Syariah dan menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, Penelitian Kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut ini :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya di ambil dari lokasi atas

¹⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian* (Jakarta : Azitama, 2010), h 183.

lapangan.¹⁸ Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi kejadian yaitu pada praktik atau implementasi Fatwa NO.20/DSN-MUI/IV/2001 di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih, jurnal, dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu¹⁹ hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan Implementasi fatwa MUI sebagai pedoman dalam proses investasi reksadana syariah di pasar modal syariah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.²⁰ Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah petugas Bursa Efek yang dapat dimintai keterangan terkait implementasi fatwa MUI NO 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h 81.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.142.

²⁰ Muhammad Pambundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Akasara, 2006), h.4.

syariah yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan Petugas PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung sebagai penyedia jasa investasi reksadana syariah ataupun yang saling berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.²¹

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²² Adapun subyek hukum yang ditetapkan untuk diteliti adalah 2 orang yaitu, 1 orang bernama Fahmi Al-Kahfi selaku *Trainer Officer* di Lembaga Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, dan 1 Orang bernama Arum Isti Khairani selaku *Marketing Officer* di PT. Indo Premier Sekuritas, yang akan dimintai keterangan dalam penelitian ini.

Lebih lanjut Arikunto, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika

²¹ Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.95.

²² Soerjono Soekanto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*”, (Jakarta : Ind Hill Company, 1990), h. 37.

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya.²³

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka peneliti mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan PT. Indo Premier Sekuritas yaitu sebanyak 2 orang responden. Dengan demikian, penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus, Karena responden hanya 2 Orang maka penelitian ini disebut penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan penginderaan.²⁴ Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu petugas BEI yang ada di Lampung yang dalam hal tersebut

²³ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.82.

²⁴ Muhadjir Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenalogik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996) , h.118.

terjadi praktik atau implementasi daripada fatwa MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 untuk kegiatan investasi reksa dana syariah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak petugas atau Manager investasi sebagai *wakil shahibul mal* dan pihak yang melakukan investasi sebagai pemodal atau *shahib al mal*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan menimba kepribadian individu.²⁵

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian maupun data lapangan.²⁶

²⁵ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), h 96.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h.82.

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

c. Sistematis

Sistematis yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui *instrument* pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis. Sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, Implementasi Fatwa NO.20/DSN-MUI/IV/2001 sebagai pedoman dalam praktik investasi reksadana syariah di pasar modal syariah yang terjadi Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung.

Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis. Yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berpikir induktif. Yaitu analisis yang dimulai dengan melakukan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum yang berlaku dalam Implementasi Fatwa NO.20/DSN-MUI/IV/2001 sebagai pedoman dalam praktik investasi reksa dana syariah di pasar modal syariah yang terjadi Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung.²⁷

²⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Azitama, 2010), h.188.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Reksa dana Syariah

Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dari prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilah antara keduanya.¹

Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, Infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasar Modal Islam atau prinsip syariah di pasar modal di definisikan sebagai berikut :

“Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan

¹ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah “Sebuah Pengenalan Dasar Tentang Pasar Modal Islam*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018), h.18.

prinsip syariah di pasar modal dan atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa MUI”.²

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa prinsip Islam yang dijadikan rujukan dalam aktivitas maupun regulasi pasar modal Islam di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Bahwa dengan demikian, keberadaan DSN-MUI, sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur pasar modal Islam di Indonesia.

Sama seperti industri keuangan Islam lainnya, pasar modal syariah yang diterapkan di banyak negara saat ini adalah adaptasi dari konsep pasar modal (Konvensional) yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun ada pemikir ekonomi Islam yang berpendapat bahwa seharusnya ekonomi Islam tidak menduplikasi ekonomi (Konvensional) yang saat ini berlaku di dunia tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun model ekonomi Islam yang diterapkan berdasarkan pendapat tersebut. Apalagi pasar modal Islam, yang notabene adalah kegiatan ekonomi yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Jelas merupakan model duplikasi dari konsep pasar modal saat ini dengan menambahkan prinsip-prinsip Islam ke dalamnya.³

Ada perbedaan dalam hal konsep, mekanisme dan struktur pasar modal Islam, diantara negara-negara yang mengembangkan pasar modal syariah saat ini. Misalnya penerbit fatwa keuangan Islam di Indonesia adalah

² Madnasir Habibi dan Rodho Intan Putri Hasibuan Ahmad, *Pasar Modal dan Reksa dana Syariah*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2011). h. 75.

³ *Ibid.*

lembaga independen (NGO-*Non Goverment Organization*) yaitu DSN-MUI, di Malaysia adalah lembaga yang merupakan bagian dari lembaga keuangan pemerintah, sedangkan di Dubai (Uni Emirat Arab) tidak ada lembaga penerbit fatwa keuangan Islam karena fatwanya melekat dalam peraturan yang diterbitkan. Bahkan di Turki dan negara-negara Timur Tengah, ada fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama secara individu atau seorang *mufti*, yang dianggap mumpuni dan diakui keilmuannya, sehingga tidak ada lembaga fatwa nasional. Perbedaan lainnya, antara lain mencakup kriteria seleksi saham syariah, penerapan akad dalam transaksi syariah atau mekanisme transaksi yang memenuhi prinsip syariah.⁴

Perbedaan tersebut muncul karena penerapan prinsip-prinsip Islam dalam industri keuangan, khususnya pasar modal Islam, sangat dipengaruhi oleh pendapat (*ijtihad*) ulama di masing-masing negara, Meskipun demikian, sumber utama yang dijadikan dasar penerapan prinsip-prinsip Islam di semua negara adalah sama, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah dan Hadist serta *Ijtihad* Ulama.⁵

Produk-produk yang dimiliki pasar modal syariah diantaranya adalah:

- Saham Syariah
- Obligasi Syariah (Sukuk)
- Reksa dana syariah.⁶

⁴ Abdul Hanan, "*Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2012), h. 68.

⁵ Fathurrahman Djamil, "*Penerapan Hukum Perjajian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). h.87.

⁶ Andri Soemitra, "*Masa Depan Pasar Modal di Indonesia*", (Jakarta : Kencana, 2014), h. 267.

a. Pengertian Reksa dana Syariah

Reksa dana, merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito.⁷

Reksa dana berasal dari dua kata yaitu **reksa** yang berarti penjaga dan **dana** yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan **syariat** yang berasal dari bahasa arab adalah syariah yang artinya yaitu hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Reksa dana mempunyai nama lain diantaranya yaitu *Unit Trust* atau *Mutual Fund* atau *Investment Fund* adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). "*Mutual Fund is acompany that invest in diversified portofolio of securities*". Portofolio investasi reksa dana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga.⁸

Reksa dana menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah (*Islamic*

⁷ Iggi H, Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.43.

⁸ Abdul Aziz, "*Manajemen Investasi Syariah*", (Bandung : Alvabeta, 2010), h.34.

Investment Funds) adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.⁹

Unsur-unsur yang ada dalam Reksa dana Syariah meliputi :

- 1) Investor orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
- 2) Manajer Investasi adalah perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek yang dapat berupa perusahaan efek yang berbentuk divisi tersendiri/PT khusus dan perusahaan khusus manajemen investasi.
- 3) Portofolio efek adalah kumpulan sekuritas yang dikelola.
- 4) Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal, misalnya saham, obligasi, dll, yang boleh dibeli jika telah mendapat ijin Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
- 5) Bank Kustodian adalah lembaga penitipan harta efek dan lainya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk Bank Umum.¹⁰

b. Dasar Hukum Reksa dana Syariah

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para Fuqaha lainnya yaitu :

⁹ Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhruddin, Hendi, "*Pasar Modal di Indonesia*", (Jakarta : Salemba Empat, 2011) h.62.

¹⁰ *Ibid*, h.63.

“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh Islam atau bertentangan dengan nash syariah.”.¹¹

Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَخِمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5): 1).¹²

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslim, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadist:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَ نَابِئُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ شَكَ الشَّيْخُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.249.

¹² *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h.106.

وَسَلَّمَ الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ
 سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه
 أبو داود)¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Al Mahri, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Bilal. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdul Wahid Ad Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal atau Abdul Aziz bin Muhammad-Syeikh merasa ragu-ragu, dari Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW berabda, “Perjanjian damai diperbolehkan diantara orang-orang muslim. “Ahmad menambahkan, “Kecuali perjanjian damai yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.” Sedangkan Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim terikat di atas syarat-syarat mereka.”(HR. Abu Daud)

Hadist ini menjelaskan bahwa seluruh macam *shulh* (perdamaian) antara Kaum Muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasulnya. Umat Islam wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam reksa dana syariah berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan bagi hasil mudharabah/ musyarakah. Prinsip dalam berakad juga harus mengikuti hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29:

¹³ Sulaiman Ibnu Ishad Al-Azdi Abu Dawud, “*Sunan Abi Dawud*”. (Diponegoro: Bandung, 836), h.304.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29).¹⁴

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan, kemudian Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI NO. 20/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan reksa dana Islam sebagai reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*Shahib al-mal/ rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.¹⁵

c. Sejarah Reksa dana Syariah

Reksa dana mulai dikenal sejak abad ke-19, cikal bakal industri ini bisa dirunut pada tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi milik bosnya, di Amerika Robert melihat peluang investasi baru, yang muncul menyusul berakhirnya Perang saudara. Ketika

¹⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h.83

¹⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.250.

pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuanya tersebut kepada beberapa temannya. Beliau berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi Robert tidak memiliki cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi ini pertama di Inggris, pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai Reksa dana tertutup (*closed-end fund*).¹⁶

Instrumen reksa dana mulai dikenal pada tahun 1995, yakni dengan diluncurkannya PT BDNI Reksa dana. Berdasarkan sifatnya BDNI Reksa dana adalah reksa dana tertutup mirip *The Schottish American Investment Trust*. Seiring dengan hadirnya UU Pasar Modal pada tahun 1996, mulailah reksa dana tumbuh aktif. Reksa dana yang tumbuh dan berkembang pesat adalah reksa dana terbuka.¹⁷

Pada tahun 1997, perusahaan sekularitas milik negara PT. Danareksa juga menjadi prionir dalam menerbitkan reksa dana syariah. Reksa dana ini menjadi instrument pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah.¹⁸

Inisiatif mulai dilakukan oleh Bapepam untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997 maka dihadirkannya produk reksa dana syariah

¹⁶ Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.65.

¹⁷ Suryadi Purwanto, "*Determinasi Sosial-Ekonomi dalam Investasi*", (Bandar Lampung : Darmajaya Press, 2014), h 65.

¹⁸ *Ibid*, h.66.

yang bernama Danareksa Syariah. Reksa dana syariah yang didirikan itu berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang dituangkan dalam akta Nomor 24 tanggal 12 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Djedjem Wijaya, S.H di Jakarta antara PT Danareksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank N.A Jakarta sebagai Bank Kustodian. PT Danareksa Fund Management 1992, yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusan nomor C2/7283.HT.01.TH.92 tanggal 3 September 1992.

d. Prinsip Transaksi Reksa Dana Syariah

Reksa dana Syariah adalah Reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksa dana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan.

Salah satu tujuan dari Reksa dana Syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggung jawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

e. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

Adapun perbedaan antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

¹⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian TeoritisPraktis*. (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.61.

Tabel 1
Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional

Perbedaan	Reksa dana Syariah	Reksa dana Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> tetapi juga <i>Socially responsible investment</i>	<i>Return</i> yang tertinggi
Operasional	Adanya proses <i>screening</i>	Tanpa proses screening
<i>Return</i>	Proses cleansing filtersisasi dari kegiatan haram	Tidak Ada
Pengawasan	DPS dan BAPEPAM	BAPEPAM
Akad	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesempatan tanpa ada aturan halal dan haram
Transaksi	Tidak boleh ada spekulasi yang magrib (<i>maysir, gharar, riba</i>)	Selama transaksinya bisa memberikan keuntungan

Sumber : Jurnal Magister Manajemen. Vol.01, No.1, Januari 2015.

2. Pedoman Investasi Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSNMUI NO.20/IV Tahun 2001

a. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001.

Adapun Mekanisme Reksa Dana Syariah yang diberikan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, melalui Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 sebagai pedoman dalam pelaksanaan Reksa Dana Syariah agar tidak keluar dari nilai-nilai ajaran agama Islam tercantum di dalam Bab 2, Pasal 2 dalam fatwa tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas :

a) Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*.

- b) Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

2) Karakteristik sistem *mudharabah* adalah :²⁰

- a) Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahib al mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b) Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

3) Pemodal dalam Reksa Dana Syariah

Pemodal adalah seseorang yang menanamkan modal yang dimilikinya untuk diolah dalam suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan, pemodal bisa disebut juga sebagai *investor* (orang yang melakukan investasi).²¹

Investasi adalah dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta, selain itu investasi juga merupakan

²⁰ Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 571.

²¹ Muhammad Samsul, *"Pasar Modal dan Manajemen portofolio"*, (Jakarta : Erlangga, 2010). h.54.

suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang, Invetasi adalah kegiatan yang diawali dengan mengorbankan kegiatan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.²²

Pemodal dalam Reksa dana syariah maksudnya adalah seseorang yang menginvestasikan hartanya pada produk reksa dana syariah untuk diolah oleh Manajer Investasi lalu dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dari proses investasi tersebut.

4) Manajer Investasi pada Reksa Dana Syariah

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.²³

5) Sistem Wakalah dalam Reksa Dana Syariah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad ini berlaku antara pemodal dengan manajer investasi (pengelola investasi reksa dana).

Akad antara pemodal dengan Manajer Investasi, menggunakan akad wakalah bil ujah, dimana pemilik modal mewakilkan dananya

²² Mardhiyah Hayati, "Investasi Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1 (Mei), h.66.

²³ Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.570.

untuk dikelola oleh Manajer Investasi, atas hal itu maka manajer investasi berhak menerima ujah (*fee*) atas pengelolaan.²⁴

6) Sistem Mudharabah dalam Reksa Dana Syariah

Mudharabah/ qiradh adalah suatu akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* (pemilik harta) sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.

Akad antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi menggunakan akad *mudharabah*.²⁵

b. Keuntungan dan Resiko Kerugian pada Investasi Reksa Dana Syariah

1) Keuntungan Investasi pada Reksa dana Syariah

Keuntungan berinvestasi di reksa dana syariah ini adalah likuid dan tidak ada jangka waktu, mendapat kenaikan Nilai Aktiva Bersih (NAB), nilai investasinya terjangkau, transparan, penyebaran resiko yang terukur, dan jangka waktunya panjang.²⁶

²⁴ Tata Dana” (On-line), tersedia di : <http://www.tatadana.com> (21 Januari 2020).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ekonomi Syariah” (On-line), tersedia di : <http://www.ekonomisyariah.org> (21 Januari 2020).

Secara umum keuntungan dalam melakukan investasi pada reksa dana antara lain :

a) Likuiditas

Investor yang membeli reksa dana *open-end*(terbuka) dapat menjual kembali kepada penerbitnya setiap saat dan penerbit secara hukum wajib membelinya sesuai harga pasar yang berlaku saat itu. Dengan demikian, reksa dana jauh lebih likuid dibandingkan dengan saham atau obligasi yang diperdagangkan pembeli yang berminat sesuai dengan jumlah dan harga yang disepakati lebih dahulu.²⁷

b) Diversifikasi

Investasi dalam reksa dana di back up dengan sekelompok instrumen di pasar modal atau pasar uang. Kelompok instrumen tersebut selalu berubah setiap saat agar dicapai nilai maksimum dari portofolio yang bersangkutan. Untuk mengurangi resiko investasi, maka portofolio efek diversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas pun dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana mestinya.

²⁷ Sunariyah, “*Portofolio dan Pasar Modal*”, (Jakarta : Erlangga, 2009), h.76.

c) Manajemen Profesional

Menjadi pengelola (manajer investasi) diwajibkan memiliki izin sebagai penasihat investasi sehingga hanya orang tertentu saja yang dapat menjadi manajer atau penasihat investasi. Pengelolaan portofolio dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana yang di dukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

d) Biaya yang rendah

Reksa dana merupakan sekumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara profesional, maka dengan besaran kemampuannya untuk melakukan transaksi secara kolektif tersebut akan dihasilkan efisiensi biaya transaksi.

e) Pelayanan bagi Pemegang Saham

Reksa dana biasanya menawarkan daya tarik kepada pemegang sahamnya misalnya, dengan menjanjikan untuk melakukan reinvestasi terhadap *dividen* dan *capital gain* secara otomatis yang sebenarnya diterima oleh nasabah.

f) Transparansi Informasi

Reksa dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaan secara berkesinambungan, sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau

perkembangan keuntungan, biaya, dan tingkat resiko investasi setiap saat.²⁸

Selain itu reksa dana memiliki adil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional. Di sisi lain, reksa dana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material. Penghasilan investasi yang dapat diterima melalui reksa dana syariah, antara lain sebagai berikut:

(1) Dari saham dapat berupa :

(a)*Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibagikan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.

(b)*Rights* yang merupakan hak untuk dalam memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.

(c)*Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.²⁹

(2) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.

²⁸ Edwin Mustafa Nasution, “*Investasi Pada Pasar Modal*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h.34.

²⁹ Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), h.88.

(3) Dari Surat Berharga Pasar yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari *issuer*.

(4) Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank–bank Syariah.³⁰

2) Resiko Investasi pada Reksa dana Syariah

Resiko Kerugian pada reksa dana syariah dapat terjadi dikarenakan penurunan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang bisa terjadi karena pergerakan efek di pasar, resiko berkurangnya nilai tukar mata asing, resiko perubahan kondisi politik dan ekonomi, resiko likuiditas, resiko peraturan dan perpajakan, hingga resiko kredit karena wanprestasi.³¹

Sekalipun berinvestasi di reksa dana syariah memiliki beragam keuntungan yang menggiurkan namun berinvestasi pada reksa dana syariah juga memiliki resiko, adapun resiko-resikonya adalah sebagai berikut :

- a) Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.
- b) Resiko Likuiditas

Resiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjuakan kembali atas unit-unit yang dipegangnya

³⁰ Fahmi Irham, “*Rahasia Saham dan Obligasi*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.25.

³¹ Rodoni Ahmad dan Abdul Hamid, “*Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2008), h.43

c) Resiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan semikian, harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksa dana.

d) Resiko Pasar

Terjadinya fluktuasi nilai sekuritas di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio.

e) Resiko Inflasi

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya total *real return* investasi.

f) Resiko Nilai Tukar

Resiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

g) Resiko Spesifik

Setiap sekuritas dapat menurunkan nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibanya.³²

³² Eduardus Tandelilin, “*Portofolio dan Investasi teori dan Aplikasi*”, (Yogyakarta : Kanisius, 2010). h.76.

3) Ketentuan Penutup pada Fatwa

Ketentuan penutup pada fatwa nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi pada Reksa Dana syariah yaitu terdapat pada Bab VI Pasal 12 adalah sebagai berikut ini :

- a) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh DSN-MUI.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4) Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Dalam Islam

a) Pengertian Fatwa

Pengertian *fatwa* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya yaitu jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah.³³

Pengertian fatwa secara istilah adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk

³³ KBBI” (On-Line), tersedia di : <http://kbbi.com> (21 Januari 2020), h.406.

umum, Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.³⁴

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional “*ikhtiyariyah*” yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat “*i’lamiyah*” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama kepada mufti atau seorang ahli yang lain.³⁵

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum, fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta’*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau disebut dengan membuat hukum tanpa dasar, dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.³⁶

Fatwa terpaut dengan *fiqih*, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi, fikih memuat uraian sistematis tentang

³⁴ Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.570.

³⁵ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 (Desember 2017), h.449.

³⁶ *Ibid.*

substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dari uraian rinci seseorang berkonsultasi dengan *mufti* untuk memperoleh advis atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkrit ketentuan fikih dalam masalah tertentu.³⁷

Fatwa muncul sebagai jawaban terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad berikutnya. Permulaan fatwa adalah ketika masa Rasulullah SAW, segala permasalahan dipertanyakan kepada Rasulullah untuk mendapatkan jawaban akan suatu permasalahan, Para sahabat meminta jawaban kepada Rasulullah yang berarti mereka meminta fatwa (*istifa*), Kemudian kewajiban dakwah dilanjutkan oleh para sahabat.

Ibnul Al-Qayyim Al-Jauziyah (wafat 751 H) membedakan tugas Rasul kepada *tabligh* dan *ifta* yang keduanya menghendaki basis pengetahuan tentang apa yang disampaikan dan memiliki sifat benar (*shidq*). Karena itu tiadalah patut derajat *tabligh* maupun *ifta* dipikulkan melainkan kepada seseorang yang berilmu (sesuai dengan maqam keilmuannya) dan memiliki sifat benar (*shiddiq*),

³⁷ Bunyana Solihin, “*Kaidah Hukum Islam*”, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2015), h.18.

dalam arti dia harus mengetahui hal yang disampaikan dan membenarkan sepenuhnya.³⁸

Fatwa menurut Amir Syari-fuddin, berasal dari kata *afta* yang berarti memberikan penjelasan. Secara defenitif, fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya, sedangkan fatwa menurut ahli syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.³⁹

Menurut dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dari mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwa nya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan

³⁸ Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*" (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016), h.37.

³⁹ Anita Marwing , "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Amwal*, Vol.2 No.2(September 2017), h.215.

kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.⁴⁰

b) Dasar Hukum Fatwa

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa mebiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan mebiarkan umat dalam kebingungan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqadi* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Dasar Hukum dikeluarkan nya Fatwa adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعْنُونَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab (Al-Qur'an), mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula)

⁴⁰ *Ibid.*

oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat.” (QS. Al-Baqarah :159)⁴¹

Pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Ayat ini merupakan ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan keterangan yang menjelaskan tujuan-tujuan baik dan petunjuk yang bermanfaat bagi hati, yang dibawa oleh para Rasul-Nya. Abu Al-aliah menuturkan, ayat ini turun berkenaan dengan Ahlul Kitab yang menyembunyikan sifat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian mereka dilaknat oleh segala sesuatu, akibat perbuatan mereka itu.⁴²

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah Kalalah) Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah itu.” (QS. An-Nisa : 176)⁴³

Pada Tafsir Al-Mukhtashar, dibawah pengawasan Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid(Imam Masjidil Haram), bahwa Allah menjelaskan bagi kalian pembagian harta warisan dan hukum kalalah, supaya kalian tidak tersesat dari jalan kebenaran dalam perkara pembagian warisan. Dan Allah Maha Mengetahui

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h.17.

⁴² Tafsir Ibnu Katsir” (On-line), tersedia di: <http://baitsyariah.blogspot.com> (24 Juni 2020).

⁴³ *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Jakarta : Pustaka Setia, 2001), h.62.

kesudahan-kesudahan perkara-perkara dan segala sesuatu yang membawa kebaikan bagi hamba-hambanya.⁴⁴

As-Sunnah (Hadist)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْفَرِيُّ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ". (رواه احمد ابن حنبل)⁴⁵

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid dari bukunya, berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id-yaitu Ibnu Ayyub- berkata; telah menceritakan kepada kami Bakr bin Amru Al-Ma'afiri dari 'Amru bin Abi Nu'aimah dari Abi Utsman Muslim bin Yasar dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengatakan sesuatu atas namaku yang aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan barangsiapa dimintai musyawarah oleh saudaranya sesama muslim lalu ia memberikan pendapatnya dengan menyimpang dari kebenaran maka ia telah mengkhianatinya. Dan Barangsiapa memberi fatwa yang tidak jelas (kebenarannya), maka dosanya adalah bagi orang yang memberikan fatwa." (Musnad Ahmad Ibnu Hanbal)

Bahwasanya, dalam mengeluarkan fatwa atas suatu perkara para ulama harus menggunakan sumber ajaran Islam yang pasti yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Saw, ber-*ijtihad* dengan sebaik-baiknya, tidak di dorong oleh hawa nafsu keduniaan tetapi

⁴⁴ Tafsir Al-Mukhtashar" (On-line), tersedia di: <http://tafsirweb.com> (24 Juni 2020).

⁴⁵ Ahmad Ibnu Hanbal, "Kitab Musnad Ahmad", (Mesir: Darul Hadist, 227 H), h.259.

mengharapkan ridho Allah Swt, jika tidak maka ia menanggung dosa akibat perbuatan tersebut.

c) Metode Penetapan Fatwa

Sebelum sebuah fatwa ditetapkan sebagai rujukan bagi umat khususnya umat Islam dalam mengaplikasikan agamanya dalam setiap sendi kehidupan maka perlu adanya metode-metode yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum menetapkan fatwa yang akan dikeluarkannya sebagai rujukan.

Adapun hal-hal yang harus dipenuhi dalam Metode Penetapan Fatwa adalah sebagai berikut :

- (1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan digfatwakan tersebut, secara seksamam berikut dalil-dalilnya.
- (2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- (3) Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka :
 - (a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq*

- (b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tajrih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih Muqaran*.
- (4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa di dasarkan pada hasil ijtihad *jama'iy* (kolektif) melalui metode *bayaniy*, *ta'liliy* (*qiyasy*, *istihsany*, *ilhaqiyy*), *istitshlahy*, dan *sad adz-dzariyah*.
- (5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mushalih ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*.⁴⁶

d) Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Majelis Ulama Indonesia memiliki kewenangan dan wilayah ditetapkan nya fatwa tersebut untuk dilaksanakan, adapun segala kewenangan dan wilayah fatwa tersebut adalah sebagai berikut ini :

- (1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
- (2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor (1) yang

⁴⁶ Hijrah Saputra, Andriansyah Syihabudin, Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.20.

menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain

- (3) Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya.
- (4) Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor (3) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
- (5) Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.
- (6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.⁴⁷

Kedudukan Fatwa, Bagir Manan mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk, menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formil, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah di Indonesia yang pandangan hidup

⁴⁷ *Ibid*, h.22.

penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting sekali.⁴⁸

Fatwa merupakan anjuran yang dapat ditaati maupun tidak ditaati. Karena posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan kepada sebuah fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang dapat terjadi di masyarakat seringkali terjadi adalah sanksi moral.⁴⁹

Walau demikian, ada beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia, seperti pada Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang terhadap makanan halal, dan Undang-undang tentang Perekonomian Syariah, Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia.⁵⁰

e) Hubungan Antara Fatwa dan Mazhab

Pengertian mazhab dalam istilah fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu:

- (1) Jalan pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
- (2) Pendapat atau fatwa seorang *mujtahid* atau *mufti* tentang hukum suatu kejadian.

⁴⁸ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 (Desember 2017), h.450.

⁴⁹ *Ibid*, h.452

⁵⁰ *Ibid*.

Secara umum, proses lahirnya *mazhab* yang paling utama adalah faktor usaha para murid imam *mazhab* yang menyebarkan dan menanamkan pendapat para imam kepada masyarakat dan juga disebabkan adanya pembukuan pendapat para imam *mazhab* sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena pada dasarnya, para imam mazhab tidak mengakui atau mengklaim sebagai “*mazhab*”. Secara umum, *mazhab* berkaitan erat dengan nama imam atau tempat.⁵¹

Pada dasarnya seorang *mufti* memfatwakan hasil *ijtihad*-nya sendiri dan *maqallid* yang terikat dengan imam *mazhab* tertentu harus memfatwakan hasil *ijtihad* imam yang diikutinya. Selain itu, seorang *mufti* dalam memberikan fatwa jika mufti itu belum mencapai taraf *mujtahid* dan tidak konsisten (tetap) mengikuti imam *mujtahid* tertentu.⁵²

Adapun seorang *alim* yang telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat imam *mazhab* dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat imam-imam *mujtahid* yang ada, meskipun belum mencapai derajat *mujtahid*, maka boleh ia memfatwakan pendapat salah satu imam

⁵¹ Acne Admira Arafah, Ahmad Qarib, Ardiyansyah, “Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Al-Tafahum*, Vol.2 No.1(Januari-Juni 2018), h.22.

⁵² *Ibid.*

mazhab yang ada. Namun dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya itu ia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya ia harus ikhlas dan beritikad baik untuk mewujudkan kemashlahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun.
- (b) Ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama, juga tidak mempermudah agama.
- (c) Ia memilih pendapat yang menurut keyakinannya benar dan kuat dalilnya.

Bila suatu kelompok atau jamaah sama-sama mengikuti pendapat atau fatwa imam *mujtahid* tertentu, maka kelompok yang mengikuti pendapat imam *mujtahid* biasa disebut pengikut mazhab, seperti Indonesia yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i.⁵³

B. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan masalah dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian pertama yang ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Makrufah yang berjudul Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah

⁵³ *Ibid*, h.23.

Studi Kasus di PT Danareksa Investment Management Surabaya pada tahun 2014.⁵⁴

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukan bahwa dalam fatwa DSN-MUI no. 20 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, ada perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah dalam hal akad yakni pada Pasal 2 (1) “reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad *wakalah* antara manajer investasi dengan pemodal atau investor dan akad antara Manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudarabah*, dan kemudian dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) tentang akad-akad syariah Pasal 1 (m) menyatakan adanya asas *al-kitabah* (tertulis) yang artinya *sighah* sebuah akad diharuskan dalam bentuk tertulis. Dan ini juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 yang menyatakan dalam akad-akad syariah yang digunakan dalam pasar modal bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad wajib menyatakan secara tertulis pernyataan *ijab* dan *qabul*. Sehingga dalam hal akad produk reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management belum memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.

⁵⁴ Nur Makrufah “Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah Studi Kasus di PT Danareksa Investment Management Surabaya”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,Surabaya,2014), h.66.

Penelitian kedua yang ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Nur Widyastuti yang berjudul *Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.20 Tahun 2001 Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management pada tahun 2012*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa Produk reksa dana Batasa kombinasi dan reksa dana Danareksa syariah berimbang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut, pada mekanisme kegiatan reksa dana, hubungan, hak dan kewajiban. Sedangkan untuk pemilihan pelaksanaan investasi serta penentuan dan pembagian hasil investasi masih belum semuanya sesuai dengan fatwa.⁵⁵

Penelitian ketiga yang ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ghoibi yang berjudul *Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Studi Kasus di Katagori Reksa Dana Pendapatan Tetap pada tahun 2014*.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Pengukuran kinerja reksadana syariah pendapatan tetap berdasarkan metode *Sharpe* dari 7 reksa dana menghasilkan dua reksa dana yang mampu menghasilkan kinerja diatas kinerja tolak ukurnya (IRDPT) yaitu reksa dana SAM Sukuk Syariah dan Mega Dana Obligasi Syariah dan sisanya lima reksa dana yang berkinerja inferior. Metode *Treynor*

⁵⁵ Kurnia Nur Widyastuti, “Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.20 Tahun 2001 Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management”, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, 2012), h.60.

menghasilkan lima reksadana pendapatan tetap yang memiliki kinerja superior yaitu SAM Sukuk Syariah, MNC Dana Syariah, BNI Dana Syariah, PNM Amanah Syariah dan dua reksa dana yang berkinerja Inferior.⁵⁶

Diatas telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN MUI Pasal 2 NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah, Studi kasus di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung.

⁵⁶ Ghoibi, “Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Studi Kasus di Katagori Reksa Dana Pendapatan Tetap”,(Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung,Lampung,2016), h.73.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan, *Pasar Modal Syariah Sebuah Pengenalan Dasar Tentang Pasar Modal Islam*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ahmad, Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008.
- Al-Arif, Muhammad Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- , *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Setia, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Ashshofa, Burhan, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung : Alvabeta, 2010.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Ghoibi, *Analisis Pengukuran Kinerja Reksa Dana Syariah Berdasarkan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen Studi Kasus di Katagori Reksa Dana Pendapatan Tetap*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Lampung, 2016.
- Habibi, Madnasir, Rodho Intan dan Putri Hasibuan, Ahmad, *Pasar Modal dan Reksadana Syariah*, Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Jakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1994.

- Hanan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2012.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ibnu, Sulaiman Ishad Al-Azdi Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Diponegoro: Bandung, 836.
- Ibnu, Ahmad Hanbal, *Kitab Musnad Ahmad*, Mesir: Darul Hadist, 227 H.
- Irham, Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, Bandung : Alvabeta, 2013.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Makrufah, Nur, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah Studi Kasus di PT Danareksa Investment Management Surabaya*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Mardani, “*Hukum Sistem Ekonomi Islam*”, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustafa, Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal*, Jakarta : Prenada Media Group, 2007.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2016.
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Phenomenalogik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.
- Purwanto, Suryadi, *Determinasi Sosial-Ekonomi dalam Investasi*, Bandar Lampung : Darmajaya Press, 2014.
- Samsul, Muhammad, *Pasar Modal dan Manajemen portofolio*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Saputra, Hijrah, Andriansyah Syihabudin dan Adhika Prasetya, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014.

Solihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2015.

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian*, Jakarta : Azitama, 2010.

Sunariyah, *Portofolio dan Pasar Modal*, Jakarta : Erlangga, 2009.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Tandelilin, Eduardus, *Portofolio dan Investasi teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Tika, Muhammad Pambundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Akasara, 2006.

Tjiptono, Darmadji dan M. Fakhruddin, Hendi, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Pratomo, Eko Priyo dan Nugraha, Ubaidillah, *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Purwanto, Suryadi, *Determinasi Sosial-Ekonomi dalam Investasi*, Bandar Lampung : Darmajaya Press, 2014

Widyastuti, Kurnia Nur, *Kesesuaian Reksa Dana Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.20 Tahun 2001 Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus di PT Batasa Capital dan PT Danareksa Investment Management*, Skripsi Program Sarjana Ilmu Ekstensi Akuntansi Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Jurnal

Arafah, Acne Admira, Ahmad Qarib dan Ardiyansyah, “Corak Mazhab Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Al-Tafahum*, Vol.2 No.1 Januari-Juni 2018.

Fariana, Andi, “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia”. *Jurnal Al-Hikam*, Vol.12 No. 1 Juni 2017.

Habibaty, Diana Mutia, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.4 Desember 2017.

Hayati, Mardhiyah, “Investasi Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.1 No.1 Mei 2017.

Hasby, Hariandy, “Kinerja Reksadana Syariah Tahun 2009”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14 No.1 Januari 2010.

Marwing, Anita, “Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia”. *Jurnal Al-Amwal*, Vol.2 No.2 September 2017.

Nasution, M. Yasir, “Peran Strategis Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”. *Jurnal Human Fala*, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2014.

Nurlita, Anna, “Investasi di Pasar Modal Syariah dalam Kajian Islam”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17 No. 1 Januari-Juni 2014.

Sumber Internet

Ekonomi Syariah” (On-line), tersedia di : <http://www.ekonomisyariah.org> (21 Januari 2020).

Investor Bandar Lampung Mendominasi Pasar Modal Lampung” (On-Line), tersedia di: <http://lampungprov.go.id> (29 Agustus 2019).

Majelis Ulama Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/> (30 Juli 2020).

Membayar Upah Sebelum Keringat Kering” (On-line),tersedia di: <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>, (25 Oktober 2019).

Tata Dana” (On-line), tersedia di : <http://www.tatadana.com> (21 Januari 2020).

Zona Referensi” (On-line), tersedia di : <http://www.zonareferensi.com> (4 Desember 2019).